

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
TANPA AKUNTANBILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
(KPRI SERBA USAHA MIGAS CEPU)**

**Rosita Dara Febry Kusmana**

Universitas Negeri Surabaya

[sitadara.dara2@gmail.com](mailto:sitadara.dara2@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to evaluate implemetation of SAK ETAP about financial statement and explain the differences between the accounting records which is used based SAK ETAP and in KPRI Serba Usaha Migas Cepu. The data research were collected through interview and documentation. The result of research showed the are differences betwee the accounting financial statement in based SAK ETAP with financial statement of KPRI Serba Usaha Migas Cepu.the financial statement KPRI Serba Usaha Migas Cepu consist of balance sheet, income statement, statement changes in equity, cash flow, statement the result of operation and note of financial statement.*

*Keywords : SAK ETAP, financial statement, KPRI Serba Usaha*

**PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memnuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan untuk penguatan dan perluasan usaha serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pengelolaan

koperasi harus dilakukan dengan baik agar usahanya dapat bertahan dan berkembang. Peran pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pengembangan koperasi adalah mewujudkan pengelolaan koperasi yang profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Terlaksananya prinsip-prinsip tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Menurut Sulistiawan (2006) *Statement of the Accounting Principle Board No.4*, dewan penyusun standar Akuntansi di Amerika Serikat, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan tentang suatu badan usaha untuk pengambilan keputusan ekonomis. Maksudnya akuntansi dapat diartikan sebagai: (1) kegiatan jasa; (2) akuntansi menyediakan informasi kuantitatif bersifat keuangan; (3) akuntansi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomis. Penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangan koperasi menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha pada umumnya (Musyafa'ah:2014)

Koperasi merupakan bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga SAK ETAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban tahunan koperasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penerapan SAK dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh suatu badan usaha. Tolok ukur bagi pemilik dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui tambahan modal yang dicapai dan juga dapat mengetahui keseimbangan hak dan hutang yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan mensahkan SAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik dalam menyajikan laporan keuangan. Entitas tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas yang menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Koperasi**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 1 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki prinsip tertera dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 yaitu: a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, b) pengawasan oleh anggota koperasi diselenggarakan secara demokratis, c) anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, d) koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen, e) koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi, f) koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dan g) koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 37 harus berisikan: a) laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil yang telah dicapai, b) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan koperasi, c) laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, d) laporan pengawas, e) Nama pengawas dan pengurus dan f) besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi pengurus. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

## **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**

Pengertian standar akuntansi menurut Suwardjono adalah konsep, prinsip, metoda, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.

Standar akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Sesuai dengan Pedoman Akuntansi Koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 menyebutkan bahwa koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik maka akuntansi koperasi menggunakan standar SAK ETAP.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

## **Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis untuk aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Sedangkan harga historis untuk kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Untuk dasar pengukuran nilai wajar menggunakan jumlah yang dipakai untuk mempertahankan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

### **Pengakuan Unsur-Unsur Dalam Laporan Keuangan**

#### 1. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh entitas. Aset tetap memiliki bentuk fisik namun bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Beberapa aset adalah aset tidak berwujud. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

#### 2. Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban diakui dalam neraca jika

kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

### 3. Penghasilan

Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

### 4. Beban

Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban yang timbul misalnya beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan sedangkan untuk kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas. Kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

## Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi sebuah entitas. Menurut Suwardjono (2009:65) laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lain.

Tujuan laporan keuangan dalam SAK ETAP paragraf 2.1 adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan entitas dan informasi-informasi yang disajikan dalam setiap laporan keuangan sesuai yang diatur dalam SAK ETAP adalah:

### a. Neraca

Neraca menyajikan aset, hutang, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu-akhir periode pelaporan (SAK ETAP paragraf 4.1).

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 1) Kas dan setara kas, 2) Piutang usaha dan piutang lainnya, 3) Persediaan, 4) Properti investasi, 5) Aset tetap, 6) Aset tidak berwujud, 7) Utang usaha dan utang lainnya, 8) Aset dan hutang pajak, 9) Hutang diestimasi, dan 10) Ekuitas

### b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain (SAK ETAP paragraf 5.2).



Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 1) Pendapatan, 2) Beban keuangan, 3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, 4) Beban pajak, dan 5) Laba atau rugi neto

c. Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- (1) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
- (2) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

d. Laporan Arus Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya (SAK ETAP paragraf 7.2).

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (SAK ETAP paragraf 8.1).

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yaitu:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna

b. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi

c. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

d. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan, material dan bias jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu

e. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi

f. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian

g. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan

h. Tepat waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan

i. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan di KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu pada bulan Maret 2014 sampai dengan data-data terpenuhi.

### **Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan (Arsani dan Putra: 2013). Data primer yang berhubungan dengan penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak koperasi seperti perlakuan akuntansi pendapatan dan beban yang diterapkan oleh koperasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sugiyono, 2008:129). Data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini seperti laporan keuangan serta buku atau skripsi yang menunjang penelitian ini.

### **Jenis Penelitian**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu dengan SAK ETAP.

Moloeng mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Karena analisis datanya dilakukan secara induktif, maka upaya pencarian data dalam metode ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan tapi lebih merupakan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan (Moleong,2012:10)

## **PEMBAHASAN**

Koperasi Serba Usaha Migas Cepu didirikan sejak tahun 1963 oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional atau Permigan, terdaftar sebagai badan hukum koperasi di Direktorat Koperasi Dati II Blora Jawa Tengah pada tanggal 12 Juli 1963 dengan Nomor : 5/B.H/VI-9 yang diberi nama Koperasi Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional. Setelah mengalami pergantian nama beberapa kali akhirnya pada tahun 1984 koperasi ini didaftarkan kembali di Direktorat Koperasi Jawa Tengah di Semarang dengan nama Koperasi Serba Usaha Migas Cepu. Saat ini aset yang dimiliki oleh KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu juga terbilang tidak

sedikit yaitu sebesar Rp 10.383.373.142. Dengan nilai aset yang besar diperlukan pencatatan akuntansi yang baik. Disamping itu, peraturan menteri koperasi dan UMKM mewajibkan kepada semua UMKM dan Koperasi untuk menyelenggarakan laporan keuangan. Karena tujuan dari laporan keuangan itu dimanfaatkan oleh pihak internal ataupun eksternal.

Dewan Ikatan Akuntan Indonesi menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik berfungsi untuk menyelaraskan pemakaian laporan keuangan yang diselenggarakan UMKM dan Koperasi. Namun, tidak semua UMKM dan Koperasi dapat menyelenggarakan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu telah menyelenggarakan laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban koperasi selama satu periode. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu adalah 1) Neraca, 2) Laporan Hasil Usaha, 3) Laporan Laba Rugi, 4) Laporan Perubahan Modal, 5) Laporan Arus Kas dan 6) Catatan atas laporan keuangan.

### **Pengukuran dan Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan KPRI Serba Usaha Migas Cepu**

#### 1. Aset

KPRI Serba Usaha Migas Cepu mengklasifikasikan aset berdasarkan likuiditasnya, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset yang diklasifikasikan menjadi aset lancar jika diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal, dimiliki untuk diperdagangkan, diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Apabila aset tidak memnuhi kriteria tersebut maka dapat diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar

atau aset tetap. Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) yang dihitung tiap akhir bulan.

**Tabel 1**  
**Daftar Aset Lancar**

Nama Aset	Jumlah
1. Kas	Rp 92.168.816
2. Bank	Rp 2.115.060.159
3. Piutang	Rp 2.990.080.452
4. Panjar	Rp 77.592.830
5. PAD	Rp 97.005.066
6. Persediaan	Rp 792.740.870
Jumlah Aset Lancar	<b>Rp 6.164.648.193</b>

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tahun 2013

**Tabel 2**  
**Daftar Aset Tetap dan Penyusutannya**

Jenis Harta Tetap	Awal	Tahun Buku 2013		Akhir
		Tambah	Hapus	
Nilai Perolehan				
Tanah	Rp 77.292.300	Rp -	Rp -	Rp 77.292.300
Gedung	Rp 333.757.510	Rp 28.918.000	Rp -	Rp 362.675.510
Kendaraan	Rp 677.183.136	Rp 105.000.000	Rp 163.432.300	Rp 618.750.836
Inventaris	Rp 870.487.953	Rp 28.381.600	Rp -	Rp 898.869.553
Jumlah	Rp 1.958.720.899	Rp 162.299.600	Rp 163.432.300	Rp 1.957.588.199
Nilai Akumulasi Penyusutan				
Gedung	Rp 99.203.056	Rp 15.149.725	Rp -	Rp 114.352.781
Kendaraan	Rp 373.872.252	Rp 38.423.953	Rp 166.004.418	Rp 246.291.787
Inventaris	Rp 763.398.307	Rp 43.614.635	Rp -	Rp 807.012.942
Jumlah	Rp 1.236.473.615	Rp 97.188.313	Rp 166.004.418	Rp 1.167.657.510
Nilai Buku				
Tanah	Rp 77.292.300	Rp -	Rp -	Rp 77.292.300
Gedung	Rp 234.554.454	Rp 28.918.000	Rp 15.149.725	Rp 248.322.729
Kendaraan	Rp 303.310.884	Rp 105.000.000	Rp 38.423.953	Rp 372.459.049
Inventaris	Rp 107.089.646	Rp 28.381.600	Rp 43.614.635	Rp 91.856.611
Jumlah	Rp 722.247.284	Rp 162.299.600	Rp 97.188.313	Rp 789.930.689

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tahun 2013

## 2. Kewajiban

Hutang yang dimiliki oleh KPRI “Serba Usaha” Cepu diklasifikasikan menjadi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang yang diklasifikasikan sebagai hutang lancar meliputi: a) hutang usaha, b) hutang lembaga non perbankan, c) hutang pajak, d) biaya yang masih harus dibayar, dan e) dana-dana. Untuk hutang lembaga perbankan diklasifikasikan sebagai hutang jangka panjang.

## 3. Penghasilan dan Beban

Penghasilan koperasi diakui berdasarkan metode *accrual* dimana penghasilan tersebut diakui pada saat terjadinya transaksi. Penghasilan yang diperoleh koperasi berasal dari beberapa unit usaha yang dimiliki yaitu pertokoan, simpan pinjam, persewaan dan unit usaha lainnya. Untuk penghasilan lain diluar unit usaha koperasi diklasifikasikan dalam pendapatan non operasional.

**Tabel 3**  
**Rincian Penghasilan KPRI Serba Usaha Migas Cepu Tahun 2013**

Pendapatan Operasional		Pendapatan Non Operasional	
Toko Pemuda	Rp 3.703.282.307	Jasa Giro	Rp 7.896.327
Copi centre	Rp 15.000.000	Jasa Sewa Tempat	Rp 120.284.723
Simpan Pinjam	Rp 696.167.350	Pendapatan Lain-lain	Rp 35.147.113
Piutang Barang	Rp 127.404.407		
Pengurusan SIM dan STNK	Rp 60.503.300		
Penyaluran LPG	Rp 289.333.400		
Pembayaran rek, air & listrik	Rp 216.424.699		
Persewaan	Rp 88.215.000		

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tahun 2013

Pada KPRI Serba Usaha Migas Cepu beban diakui dengan metode *accrual basis*, kecuali untuk pos-pos beban rutin dan tidak material. Beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas misalnya: beban gaji, beban listrik, air dan telepon, beban penyusutan, beban perjalanan dinas, beban pengembangan SDM. Sedangkan beban yang muncul karena kerugian adalah beban kerugian piutang. Pencatatan beban

kerugian piutang pada koperasi dengan menggunakan metode langsung sehingga tidak dibentuk cadangan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang tetapi langsung dibebankan pada periode berikutnya.

#### 4. Ekuitas

Modal yang dimiliki oleh koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain-lain, cadangan dan SHU.

### **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Neraca yang disajikan oleh KPRI “Serba Usaha” Cepu terdiri dari akun-akun yang diatur dalam SAK ETAP meliputi: 1) kas, 2) piutang usaha, 3) persediaan, 4) investasi, 5) aset tetap, 6) utang usaha, dan 7) modal. Dalam neraca tidak disajikan akun aset tidak berwujud karena KPRI “Serba Usaha” Cepu tidak memiliki aset yang dapat digolongkan dalam akun tersebut.

**Tabel 4 Neraca**

<b>KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU NERACA PER 31 DESEMBER 2013</b>		
<b>Uraian</b>		<b>Jumlah</b>
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
1. Kas	Rp	92.168.816
2. Bank	Rp	2.115.060.159
3. Piutang	Rp	2.990.080.452
4. Panjar	Rp	77.592.830
5. PAD	Rp	97.005.066
6. Persediaan	Rp	792.740.870
Jumlah Aset Lancar	<b>Rp</b>	<b>6.164.648.193</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
1. Penyertaan ke Bu Koperasi	Rp	93.600.000
2. Penyertaan ke Koperasi lain	Rp	282.975.123
Jumlah investasi jangka panjang	<b>Rp</b>	<b>376.575.123</b>
<b>ASET TETAP</b>		
1. Tanah	Rp	77.292.300
Gedung/Bangunan	Rp	362.675.510
Mobil dan Kendaraan	Rp	618.750.836



Inventaris	Rp	898.869.553
2. Akumulasi Penyusutan Gedung/Bangunan	Rp	(114.352.781)
Akumulasi Penyusutan Mobil dan Kendaraan	Rp	(249.716.365)
Akumulasi Penyusutan Inventaris	Rp	(807.012.943)
Jumlah Aset Tetap	<b>Rp</b>	<b>786.506.111</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		
1. Piutang Jangka Panjang	Rp	3.055.643.715
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>Rp</b>	<b>10.383.373.142</b>
<b>HUTANG DAN MODAL</b>		
<b>HUTANG LANCAR</b>		
1. Hutang Usaha	Rp	2.157.032.887
2. Hutang Lembaga Non Perbankan	Rp	124.780.652
3. Hutang Pajak	Rp	2.549.028
5. Biaya yang masih harus dibayar	-	
6. Dana-dana	Rp	179.273.647
Jumlah Hutang Lancar	<b>Rp</b>	<b>2.463.636.214</b>
<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>		
1. Hutang Lembaga Perbankan	Rp	3.316.655.181
Jumlah Hutang Jangka Panjang	<b>Rp</b>	<b>3.316.655.181</b>
<b>MODAL</b>		
1. Simpanan		
Simpanan Pokok	Rp	425.500.000
Simpanan Wajib	Rp	2.099.456.404
Simpanan Lain-lain	Rp	70.783.255
2. Cadangan	Rp	1.928.554.967
3. SHU	Rp	78.787.121
Jumlah Modal dan SHU	<b>Rp</b>	<b>4.603.081.747</b>
<b>JUMLAH HUTANG DAN MODAL</b>	<b>Rp</b>	<b>10.383.373.142</b>

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tahun 2013

Laporan hasil usaha yang dibuat oleh KPRI “Serba Usaha” Cepu tidak diatur dalam SAK ETAP tetapi pelaporan perhitungan hasil usaha diatur dalam UU no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 37 ayat 1 (c) dimana laporan pertanggungjawaban tahunan koperasi berisi laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

Tabel 5 Perhitungan Hasil Usaha

<b>KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU PERHITUNGAN HASIL USAHA PER 31 DESEMBER 2013</b>			
Uraian		Jumlah	
<b>A HASIL USAHA KOTOR</b>			
1. TOKO	Rp	93.112.445	
2. JASA DAN PERSEWAAN	Rp	963.038.644	
3. LAIN-LAIN	Rp	162.966.169	
<b>JUMLAH HASIL USAHA KOTOR</b>	<b>Rp</b>	<b>1.219.117.258</b>	
<b>B BEBAN UMUM</b>	<b>Rp</b>	<b>1.114.631.262</b>	
<b>C BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>Rp</b>	<b>11.377.500</b>	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>Rp</b>	<b>1.126.008.762</b>	
<b>D SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (A-(B+C))</b>	<b>Rp</b>	<b>93.108.497</b>	
<b>E KOREKSI PAJAK</b>	<b>Rp</b>	<b>21.462.508</b>	
<b>F SISA HASIL USAHA KENA PAJAK (D-E)</b>	<b>Rp</b>	<b>114.571.005</b>	
<b>G PAJAK TERUTANG</b>	<b>Rp</b>	<b>14.321.376</b>	
<b>H SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK (F-G)</b>	<b>Rp</b>	<b>100.249.629</b>	
<b>I SISA HASIL USAHA BERSIH (D-G)</b>	<b>Rp</b>	<b>76.787.121</b>	

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tahun 2013

Tabel 6 Laporan Laba Rugi

<b>KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU LAPORAN LABA/ RUGI PER 31 DESEMBER 2013</b>				
Uraian	Pendapatan	HPP	Beban Usaha	Hasil Usaha Kotor
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>TOKO PEMUDA</b>	<b>Rp 3.703.282.307</b>	<b>Rp 3.561.025.964</b>	<b>Rp 48.143.898</b>	<b>Rp 93.112.445</b>
<b>JASA DAN PERSEWAAN</b>				
Copi centre	Rp 15.000.000		Rp -	Rp 15.000.000
Simpan Pinjam	Rp 696.167.350		Rp 117.492.720	Rp 578.674.630
Piutang Barang	Rp 127.404.407		Rp -	Rp 127.404.407
Pengurusan SIM dan STNK	Rp 60.503.300		Rp 8.620.000	Rp 51.883.300
Penyaluran LPG	Rp 289.333.400		Rp 261.101.205	Rp 28.232.195
Pembayaran rek, air & listrik	Rp 216.424.699		Rp 107.811.432	Rp 108.613.267
Persewaan	Rp 88.215.000		Rp 34.984.155	Rp 53.230.845
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.493.048.156</b>		<b>Rp 530.009.512</b>	<b>Rp 963.038.644</b>
<b>Pendapatan Non Operasional</b>				
Jasa Giro	Rp 7.896.327		Rp 361.994	Rp 7.534.333
Jasa Sewa Tempat	Rp 120.284.723		Rp -	Rp 120.284.723
Pendapatan Lain-lain	Rp 35.147.113		Rp -	Rp 35.147.113

Jumlah	Rp 163.328.163	Rp 361.994	Rp 162.966.169
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 5.359.658.626</b>	<b>Rp3.561.025.964</b>	<b>Rp 4.780.143.222</b>
<b>BEBAN UMUM</b>			
Gaji			Rp 490.000.000
Lembur			Rp 22.583.000
Administrasi kantor			Rp 50.819.016
Kendaraan			Rp 3.831.500
Beban listrik. Air dan telepon			Rp 64.759.730
Rapat Anggota Tahunan			Rp 93.029.625
Penyusutan			Rp 97.188.314
Beban paket lebaran			Rp 55.000.000
Organisasi			Rp 12.515.000
Bunga			Rp 110.575.904
Honor			Rp 63.331.486
Perjalanan Dinas			Rp 28.997.305
Rapat Pengurus, pengawas dan Deperta			Rp 8.074.500
Beban Perawatan Gedung			Rp 13.803.000
Beban pengembangan SDM			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 1.114.631.262</b>
Beban lain-lain			Rp 11.377.500
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 1.126.008.762</b>
<b>SISA HASIL USAHA (1+2)-(3+4)</b>			<b>Rp 93.108.497</b>
<b>KOREKSI PAJAK</b>			
Koreksi Positif			
Paket lebaran	Rp 55.000.000		
PPh pasal 23 atas Jasa Giro	Rp 1.576.235		
Jumlah	<b>Rp 56.576.235</b>		
Koreksi Negatif			
Jasa Giro		Rp 7.896.327	
Semua pendapatan yang dikenai pph final		Rp 27.217.400	
Jumlah		<b>Rp 35.113.727</b>	
	Jumlah		<b>Rp 21.462.508</b>
<b>SISA HASIL USAHA KENA PAJAK (5+6)</b>			<b>Rp 114.571.006</b>
<b>PAJAK TERUTANG</b>			
TARIF PAJAK 25% X 50% X Rp 114.571.005 = 14.321.376			
<b>JUMLAH</b>			Rp 14.321.376
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>			Rp 100.249.629
<b>SHU BERSIH</b>			<b>Rp 78.787.121</b>

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tahun 2013

Laporan laba rugi disajikan KPRI “Serba Usaha” Cebu setiap periode yang menunjukkan penghasilan dan beban koperasi. Pendapatan yang disajikan telah

diklasifikasikan menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh KPRI “Serba Usaha” Cepu dalam setiap unit usaha yang dimiliki, sedangkan pendapatan yang diperoleh selain dari hasil unit usaha yang dimiliki diklasifikasikan dalam pendapatan non operasional.

Pendapatan yang diperoleh dari proses penjualan pada unit usaha pertokoan dan transaksi yang terjadi pada unit usaha jasa pada KPRI “Serba Usaha” Cepu diakui berdasarkan metode *accrual basis* dimana pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi. Pada unit usaha pertokoan KPRI “Serba Usaha” Cepu diperlukan juga laporan harga pokok penjualan yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk barang-barang yang terjual. Sehingga unsur-unsur yang ada dalam laporan laba rugi terdiri dari penjualan/ pendapatan, harga pokok penjualan (HPP), beban dan pajak.

**Tabel 7 Laporan Perubahan Modal**

<b>KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU LAPORAN PERUBAHAN MODAL KERJA PER 31 DESEMBER 2013</b>				
Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012	(+)	(-)
<b>Harta Lancar</b>				
Kas	Rp 92.168.816	Rp 73.021.259	Rp 19.147.557	
Bank	Rp 2.115.060.159	Rp 78.315.972	Rp 2.036.744.187	
Piutang	Rp 2.990.080.452	Rp 1.781.671.525	Rp 1.208.408.927	
Panjar	Rp 77.592.830	Rp 66.042.830	Rp 11.550.000	
PAD	Rp 97.005.066	Rp 67.862.400	Rp 29.142.666	
Persediaan	Rp 792.740.870	Rp 2.280.271.432		Rp 1.487.530.562
<b>Pajak</b>				
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.164.648.193</b>	<b>Rp 4.347.185.418</b>		
<b>Kewajiban Lancar</b>				
Hutang Usaha	Rp 2.157.032.887	Rp 2.352.683.889	Rp 195.651.002	
<b>Hutang Lembaga Perbankan</b>				
Hutang Lembaga Non Perbankan	Rp 124.780.652	Rp 236.197.420	Rp 111.416.768	
Hutang Pajak	Rp 2.549.028	Rp 70.239.162	Rp 67.690.134	
Biaya yang masih		Rp 3.973.000	Rp 3.973.000	

harus dibayar

Dana-dana	Rp 179.273.647	Rp 149.709.863	Rp 29.563.784
JUMLAH	Rp 2.463.636.214	Rp 2.812.803.334	
Perubahan Modal Kerja	Rp 3.701.011.979	Rp 1.534.382.084	Rp 3.683.724.241
Perubahan Modal Kerja			Rp 2.166.629.895
Total		Rp 3.683.724.241	Rp 3.683.724.241

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tahun 2013

Laporan perubahan modal yang disajikan oleh KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu merupakan laporan perubahan modal kerja yang unsur-unsurnya tidak sama dengan laporan perubahan modal yang diatur dalam SAK ETAP. Unsur-unsur laporan perubahan modal kerja yang disusun oleh KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu terdiri dari harta lancar dan kewajiban lancar yang menghasilkan perubahan modal untuk setiap tahun sedangkan unsur-unsur laporan perubahan modal dalam SAK ETAP paragraf 6.3 adalah (1) laba atau rugi untuk periode, (2) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, (3) setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9, dan (4) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode. Perubahan modal KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu pada tahun 2013 dibandingkan dengan modal tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.166.629.895. Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun 2013 menyajikan laporan perubahan kekayaan KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu yang terjadi selama satu periode. Kekayaan yang dimiliki oleh koperasi hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp 12.138.461.876.

Tabel 8 Laporan Arus Kas

<b>KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2013</b>	
<b>A. ARUS KAS BERSUMBER DARI AKTIFITAS OPERASIONAL USAHA</b>	
Penerimaan dari pelanggan	Rp (379.787.298)
PAD	Rp (29.142.666)
Hutang Pajak	Rp (67.690.134)
Biaya yang masih harus dibayar	Rp (3.973.000)
Piutang jangka panjang	Rp (328.682.228)
Hutang usaha	Rp (195.651.002)
Hutang lembaga perbankan	Rp -
Hutang lembaga non perbankan	Rp (111.416.768)
Beban administrasi dan umum	Rp 540.803.938
Jumlah kas bersih dari aktivitas operasional	<b>Rp (575.539.159)</b>
<b>B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penyertaan ke koperasi lain	Rp -
Aset tetap	Rp (162.299.600)
Akumulasi penyusutan gedung	Rp 97.188.314
Jumlah kas bersih dari aktivitas investasi	<b>Rp (65.111.287)</b>
<b>C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Dana-dana	Rp 29.563.784
Hutang lembaga perbankan	Rp 2.768.775.252
Hutang lembaga non perbankan	Rp -
Simpanan anggota	Rp 155.921.264
Cadangan	Rp (251.297.027)
Jumlah kas bersih dari aktivitas pendanaan	<b>Rp 2.702.963.273</b>
D. Kenaikan bersih kas dan setara kas	<b>Rp 2.062.312.828</b>
E. Kas dan setara kas awal periode	<b>Rp 151.337.231</b>
F. Kas dan setara kas akhir periode	<b>Rp 2.213.650.059</b>

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun 2013

Laporan arus kas yang disajikan oleh KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Arus kas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas, arus kas dari investasi mencerminkan pengeluaran kas yang berhubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulann bahwa KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu belum menyajikan laporan keuangan sesuai yang diatur dalam Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik.

No	Uraian	SAK ETAP	KPRI MIGAS CEPU
1	Penyajian Laporan Keuangan	Laporan keuangan yang harus dibuat oleh entitas adalah : 1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan atas laporan keuangan	Laporan keuangan yang dibuat: 1. Neraca 2. Laporan Perubahan Modal 3. Laporan hasil usaha 4. Laporan perubahan modal kerja 5. Laporan Arus kas 6. Catatan atas laporan keuangan
2	Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas	1. Laba atau rugi untuk periode 2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 3. Setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 4. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode.	1. Harta Lancar a. Kas b. Bank c. Piutang d. Panjar e. PAD f. Persediaan 2. Kewajiban lancar a. Hutang usaha b. Hutang lembaga perbankan c. Hutang lembaga non perbankan d. Hutang pajak e. Biaya yang masih harus dibayar f. Dana-dana 3. Perubahan Modal Kerja

## DAFTAR PUSTAKA

Arsani dan Putra. 2013. *Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera*. *Jurnal Akuntansi*, (online). Bali: Udayana. (diakses 13 Maret 2015).

- Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo*. Surabaya: PERBANAS.
- Basir, Syarief. 2010. *Persiapan Penerapan PSAK ETAP*. Jakarta: Newsletter: Akuntansi, Audit, Perpajakan dan Manajemen.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Musyafa'ah. 2014. *Studi Komparatif Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP dengan Pencatatan UMKM di Sidoarjo*. Surabaya: UNESA.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,. Nomor 04/per/M. KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.
- Suwardjono.2008.*Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Undang-undang no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.